

Analisis *Stakeholders* dalam Pengembangan Ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan

Nurkhalis¹, Harnios Arief², Tutut Sunarminto³

¹Institut Pertanian Bogor, khalisnauval@gmail.com

²Institut Pertanian Bogor, harniosarief@gmail.com

³Institut Pertanian Bogor, tsunarminto@gmail.com

ABSTRAK

Hutan Adat Ammatoa Kajang memiliki banyak sumber daya alam dan budaya. Sehingga terdapat potensi yang bisa dikembangkan menjadi destinasi yang berkonsep ekowisata. Namun kondisi saat ini, manajemen pengelolaan Hutan Adat Ammatoa Kajang masih belum terkelola dengan baik sebagaimana pengelolaan khusus ekowisata. Analisis *stakeholder* dilakukan untuk memetakan para pihak yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan dan rencana pengembangan ekowisata hutan adat. Selain itu analisis sosial berupa penilaian persepsi, motivasi, dan preferensi para pihak juga dilakukan untuk mengetahui ketersediaan/kondisi infrastruktur dan fasilitas yang ada, memetakan alasan (dorongan kehendak) masyarakat adat dan para pihak, dan mengidentifikasi prioritas pengembangan yang sesuai untuk pengembangan ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner tertutup dengan metode *one score one indicator* (skala 1-7). Teknik pengambilan sampel pada analisis *stakeholder* dan data sosial (pemerintah, pemangku adat, dan masyarakat lokal) yaitu *purposive sampling* sedangkan data sosial berupa pengunjung/wisatawan menggunakan teknik random sampling. Terdapat dua klasifikasi *stakeholder* yaitu *key player* (Dinas Pariwisata Bulukumba, Dinas LHK Bulukumba, Bappeda Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Tanah Towa, dan Ammatoa) dan *Context setter* (Disdikbud Bulukumba dan LSM Aman). Adapun persepsi para pihak terhadap ketersediaan dan kondisi infrastruktur/ fasilitas di kawasan adat dinilai sedang sehingga perlu ada pembenahan. Motivasi dan preferensi para pihak dinilai agak tinggi sehingga pengelolaan dalam pengembangan ekowisata hutan adat di Ammatoa Kajang dapat dilakukan dengan dua rekomendasi yaitu pengembangan tapak dan destinasi serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Ammatoa, Ekowisata, Hutan Adat, Kajang, *Stakeholder*

ABSTRACT

Ammatoa Kajang Indigenous Forest has many natural and cultural resources. It potentially can be developed into a destination ecotourism concept. However, the current circumstances, the management of Indigenous Forest Ammatoa Kajang still not well managed as a special management of ecotourism. Stakeholder analysis was undertaken to classify stakeholders with a level of influence and interest in the management and development plan of indigenous forest ecotourism development. In addition, social analysis in the form of perception, motivation, and preference assessment of the parties was also conducted in order to determine the availability / condition of existing infrastructures and facilities, to figure out the motives (impulses) of indigenous peoples and stakeholders, and identified the appropriate development priorities for ecotourism development in Ammatoa Kajang indigenous forests. The data was collected by closed ended questionnaire with one score one indicator method (scale 1-7). Sampling technique on stakeholder analysis and social data (government, indigenous people, and local community) was purposive sampling technique, while social data in the form of visitors / tourists using random sampling technique. The results showed that there were two classifications of stakeholders: key players (Dinas Pariwisata Bulukumba, Dinas LHK Bulukumba, Bappeda Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Tanah Towa, and Ammatoa) and Context setter (Disdikbud Bulukumba and LSM Aman). The Perceptions of the parties to the availability and condition of infrastructures / facilities in the adat area were rated moderate so

there need to be revamped. The motivations and preferences of the parties assessed rather high for ecotourism development in the Ammatoa Kajang customary area, so that the management of indigenous forest ecotourism development can be implemented with two recommendations are development site and destination and empowerment of local communities.

Keywords: Ammatoa Kajang, Ecotourism, Indigenous Forest, Kajang, Stakeholder

Naskah diterima : 27 Juni 2018, Naskah dipublikasikan : 15 September 2018

PENDAHULUAN

Pengetahuan tradisional masyarakat adat berbagai daerah di Indonesia dalam hal pelestarian hutan hingga saat ini masih diterapkan. Sebagai contoh, masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam upaya perlindungan kawasan hutan adatnya diatur dengan *pasang ri kajang* atau pesan leluhur yang secara lisan diturunkan secara turun-temurun oleh Ammatoa (kepala suku) untuk menjadi acuan masyarakat adat. Salah satu pesan yang dijunjung adalah *Kasimpalli* yang bermakna larangan untuk mengganggu flora dan fauna yang ada di hutan (WGII, 2016) Kondisi seperti ini mendasari Bahar (2006) menyimpulkan bahwa pengetahuan yang bersumber dari masyarakat adat membuat mereka senantiasa menjaga lingkungan dan hutan karena mendapatkan nilai manfaat terhadap alam sekitarnya. Olehnya itu keberadaan masyarakat adat baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan selain mendapatkan manfaat perlindungan terhadap bencana ekologis juga perlu mendapatkan manfaat ekonomi berupa kesejahteraan masyarakat adat. Hal tersebut sejalan dengan perubahan paradigma konservasi yang saat ini tengah berkembang, yaitu perubahan pola pikir dari kegiatan konservasi yang semula hanya berorientasi kepada perlindungan dan pengawetan (ekologi), saat ini juga harus memiliki orientasi kepada pemberian manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat sekitar hutan (Widhiastuti, 2008).

Sumberdaya yang terdapat di dalam kawasan hutan bisa berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Hutan adat contohnya yang termasuk hutan hak, bahwa masyarakat adat yang mendiami hutan adat tersebut memiliki wewenang untuk mengatur peruntukan, fungsi, dan pemanfaatan hutan adat yang ada di wilayahnya (Widowati *et. al.*, 2014). Namun hutan adat sangat rentan terhadap peraturan adat yang melarang masyarakat untuk menebang pohon atau memanfaatkan

flora dan fauna tanpa adanya izin dari kepala suku dan/atau peraturan yang membolehkan. Sehingga untuk mendapatkan *benefit* berupa kayu sebagai pendapatan ekonomi masyarakat adat peluangnya sangat minim. Oleh karena itu salah satu yang menjadi opsi masyarakat adat untuk tetap bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan adat adalah dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di wilayah adat secara efektif dan berkelanjutan.

Wahyudi (2013) mengategorikan ekowisata sebagai hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi dapat memberikan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Menurutnya ekowisata dapat dipahami sebagai ekowisata ekologi, yaitu melakukan aktivitas wisata ke suatu tempat untuk menyaksikan atau menikmati keindahan, keunikan, dan kekhasan potensi ekologi pada daerah tersebut. Potensi ekologi yang dimaksud adalah potensi sumberdaya alam, baik berupa biotik ataupun abiotik, beserta kekhasan penduduk yang mendiami wilayah ekologi tersebut. Ekowisata akan berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat lokal baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila dapat menggabungkan antara potensi alam dari suatu kawasan hutan yang dilindungi, aspek sosial masyarakat setempat, dan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku maupun penyelenggara dari kegiatan ekowisata tersebut.

Potensi yang terdapat pada hutan adat berupa keanekaragaman flora dan fauna, serta kehidupan sosial, kearifan lokal, dan kebudayaan yang unik. (Lewis *et al.*, 2011; Hermawan, 2018). Sehingga penerapan ekowisata pada kawasan hutan adat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Salah satu hutan adat yang memiliki kearifan lokal, sumberdaya hutan, dan budaya yang unik di Indonesia adalah Hutan Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan. Oleh karenanya perlu dilakukan analisis terkait stakeholder

yang memiliki potensi dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan ekowisata hutan adat di Ammatoa Kajang dan mengetahui persepsi, motivasi, dan preferensi para pihak (pemerintah, pemangku adat, pengunjung/wisatawan, masyarakat lokal) untuk menentukan strategi dalam melibatkan masyarakat adat sebagai pelaku ekowisata di daerahnya.

Tujuan kajian ini yaitu: (1) menganalisis fungsi dan peran *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata; dan (2) menganalisis persepsi ketersediaan dan kondisi infrastruktur dan fasilitas, menganalisis motivasi ekonomi, dan menganalisis preferensi para pihak terhadap pengembangan tapak/ destinasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

KAJIAN LITERATUR

***Sustainable Tourism* dengan Konsep Ekowisata**

Pariwisata adalah kegiatan multidimensi dan multifaset yang menyentuh banyak sisi kehidupan manusia bahkan berbagai aktivitas perekonomian. Tisdell *et al.*, (2012) mengemukakan alasan mengapa setiap individu ingin berwisata yaitu untuk melihat keajaiban alam dan menambah pengalaman atau memanfaatkan keindahan alam yang berbeda untuk kesenangan. Selain itu tujuan melakukan perjalanan berwisata pun bervariasi dan biasanya berubah-ubah berdasarkan siklus hidup mereka.

Melihat berbagai tren saat ini bahwa pariwisata didorong oleh sisi permintaan yang lebih banyak dibanding dengan pertimbangan dari sisi penawaran (Cooper *et al.*, 1998). Artinya bahwa semakin banyak kalangan yang ingin meluangkan waktunya untuk perjalanan wisata maka juga perlu diimbangi dengan pengelolaan wisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*). Sehingga tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan bisa terpenuhi tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan ini merupakan sebuah konsep pengembangan dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Salah satu hal yang bisa menjamin aktivitas pembangunan yang berkelanjutan ini adalah tersedianya sumberdaya yang bisa dikelola untuk

kesejahteraan masyarakat disekitar pengembangan wisata.

Pengaplikasian konsep ekowisata merupakan salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk melakukan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut dipandang perlu diterapkan karena ekowisata merupakan konsep yang memadukan antara konservasi dan pariwisata secara bersamaan. Ada banyak definisi "ekowisata" yang muncul sejak istilah tersebut diciptakan pada tahun 1987 (Bornemeier *et al.*, 1997). Menurut Ceballos-Lascuráin (1996) menyebutkan bahwa kata '*ecotourism*' merupakan sebuah kontraksi istilah dari '*ecological tourism*', oleh karena itu fokus utama dari ekowisata adalah hubungan antara pariwisata, makhluk hidup dan lingkungannya. Selain itu ia mendefinisikan bahwa ekowisata sebagai pariwisata yang melibatkan perjalanan ke daerah alam yang relatif tidak terganggu atau tidak terkontaminasi yang memiliki tujuan spesifik untuk belajar, mengagumi, dan menikmati pemandangan, tanaman, hewan, begitu pula dengan manifestasi budaya yang ada (baik dulu maupun sekarang) yang ditemukan di area ekowisata tersebut.

***Stakeholder* dan Teori Presepsi, Motivasi, dan Preferensi**

Menurut Reed *et al.*, (2009) menyebutkan bahwa *stakeholder* merupakan semua yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan. Dalam kegiatan wisata *stakeholder* menurut Damanik *et al.* (2006) menyatakan bahwa sebagai kelompok usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi tergantung kepada wisatawan yang sebagai pengguna jasa dan produk tersebut. *Stakeholder* yang dimaksudkan disini adalah baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal yang tinggal di daerah wisata.

Stakeholder dalam melibatkan diri dalam suatu pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan dapat disebut dengan analisis *stakeholder*. Analisis tersebut menjadi proses pengumpulan secara sistematis dan analisis informasi secara kualitatif untuk menentukan kepentingan siapa yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan/atau penerapan suatu program atau kebijakan. Analisis *stakeholder* ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan

memahami sifat kerjasama antara *stakeholder* yang berbeda, selain itu menunjuk secara tepat peluang untuk mengembangkan kerjasama dalam jangka waktu tertentu. Selain itu manfaat dari analisis *stakeholder* ini yaitu memberikan kemungkinan para pembuat kebijakan memperoleh kesepakatan atau keputusan pada pemahaman yang riil tentang cara *stakeholder* yang berbeda-beda tersebut dapat memperoleh keuntungan atau kerugian dari proyek atau kebijakan tersebut.

Teori Presepsi. Persepsi merupakan proses yang dilalui oleh individu dalam mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan kesan mereka yang bermaksud untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Persepsi yang di rasakan oleh individu satu dan yang lainnya dari berbagai indikator dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif (Robbins *et al.*, 2013).

Teori Motivasi. Teori motivasi mulai dikenal pada tahun 1950-an. Awalnya ada tiga teori motivasi yang dikenal secara khusus yaitu teori hierarki kebutuhan (*the hierarchy of needs theory*), teori dua faktor (*two factor theory*), dan teori X dan Y (*theories X dan Y*) (Bangun, 2011). Teori hierarki kebutuhan yang pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow menyebutkan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan (*need*) yang bergantung pada kepentingan sendiri. Maslow membagi kebutuhan manusia tersebut menjadi lima tingkatan, sehingga teori motivasi ini disebut sebagai "*the five hierarchy need*". Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah (1) kebutuhan fisiologis (*physiological need*), (2) kebutuhan rasa aman (*safety need*), (3) kebutuhan sosial (*social need*), (4) kebutuhan harga diri (*esteem need*) dan (5) kebutuhan untuk aktualisasi diri (*need for self actualization*). Motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar atau internal dan intensif diluar individu. Motivasi adalah proses membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol minat-minat (Hamalik, 2004).

Teori Preferensi. Preferensi adalah sesuatu yang menjadi pilihan atau keinginan dari masing-masing individu atau kelompok dalam memandang suatu hal. Preferensi memiliki arti sebagai hak istimewa, pengutamaan, pilihan yang paling disukai, kecenderungan atau hal yang didahulukan dan diprioritaskan, pilihan kecenderungan atau kesukaan dalam

menggunakan atau memanfaatkan sesuatu (Sugono, 2008). Berdasarkan dari pengertian tersebut maka preferensi dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan kultural adalah mencakup keinginan atau kemauan yang lebih disukai berbagai *stakeholder* atau pemanfaat lahan kultural sehingga mampu menciptakan keberlanjutan lahan-lahan dalam kegiatan kepariwisataan.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari dua sumber utama yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa pengumpulan data sosial (ketersediaan dan kondisi infrastruktur dan fasilitas) dan data *stakeholder* (pemangku kepentingan di lokasi penelitian). Data sosial diperoleh dengan melakukan observasi untuk melihat ketersediaan dan kondisi dari infrastruktur dan fasilitas penunjang ekowisata yang terdapat pada wilayah adat. Adapun penilaian pada data sosial ini adalah melihat persepsi, motivasi, dan preferensi dari infrastruktur dan fasilitas yang ada menggunakan analisis *one score one indicator*. Responden pada data sosial ini melibatkan pemerintah, pemangku adat, wisatawan/ pengunjung, dan masyarakat lokal. Aspek yang dikaji dari wawancara mendalam menggunakan kuesioner pada data sosial ini adalah aspek karakteristik, persepsi, motivasi, dan preferensi. Dari berbagai aspek yang ditanyakan kepada responden dan informan tersebut diharapkan mampu mewakili pandangan umum hingga perumusan keterlibat masyarakat adat dan stakeholder terkait dengan pengembangan ekowisata hutan adat.

Data *stakeholder* diperoleh dengan menggunakan kuesioner tertutup untuk memastikan kepentingan dan pengaruh para pihak terhadap pengelolaan hutan adat Ammatoa Kajang. *Stakeholder* yang dimaksud dari adalah semua pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan hutan adat dan dipandang potensial untuk bisa mengembangkan hutan adat menjadi tempat destinasi wisata yang berkonsep ekowisata.

Data sosial dan *stakeholder* dilakukan dengan menggunakan analisis *One Score-One Indicator System*. Analisis ini menggunakan skala 1-7 (merupakan pengembangan dari

skala Likert 1-5). Penggunaan skala 1-7 diterapkan karena sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengartikulasikan suatu nilai dengan sangat detail (Avenzora, 2008). Khusus untuk data sosial menggunakan pengukuran persepsi, motivasi, dan preferensi. Nilai skor 1-7 diberikan pernyataan sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju (2) tidak setuju (3) agak tidak setuju (4) ragu-ragu (5) agak setuju (6) setuju, dan (7) sangat setuju.

Teknik dalam analisis *stakeholders* yang dapat digunakan adalah dengan membuat kuadran *power* (kekuatan) dan *interest* (kepentingan). Analisis *stakeholders* dapat menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam Key players, context setters, subjects, dan crowd. Reed *et al.*, (2009) mengungkapkan bahwa analisis *stakeholder* dilakukan dengan: 1) melakukan identifikasi *stakeholder* dan kepentingannya; 2) mengelompokkan dan mengategorikan *stakeholder*; dan 3) menyelidiki hubungan antara *stakeholder*. Pengaruh (*influence*) merujuk pada kekuatan (*power*) yang dimiliki *stakeholders* untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan. Kepentingan (*interest*) merujuk pada kebutuhan *stakeholders* dalam pencapaian output dan tujuan. Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan skala likert yang disesuaikan, yaitu skala 1: sangat tidak tinggi; skala 2: tidak tinggi; skala 3: agak tidak tinggi; skala 4: cukup/ biasa saja; skala 5: agak tinggi; skala 6: tinggi dan skala 7: sangat tinggi (Avenzora, 2008)

PEMBAHASAN

Stakeholder merupakan para pihak yang masing-masing memiliki pengaruh, kepentingan dan obyektifitas pada suatu pengelolaan. Menurut Reed *et al.* (2009) menyebutkan bahwa *stakeholder* merupakan semua yang mempengaruhi atau dipengaruhi

oleh keputusan atau tindakan. Pemetaan keterlibatan *stakeholder* dapat dilakukan untuk mengetahui peran serta pengaruh *stakeholder* dalam sebuah sistem atau pengelolaan. Pemetaan *stakeholder* selanjutnya dapat membantu untuk menganalisis tingkat kepentingan dan kewenangan *stakeholder* yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah sistem. *Stakeholder* yang terlibat dalam keterkaitan pengelolaan kawasan adat dan rencana pengembangan ekowisata hutan adat Ammatoa Kajang diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, Disdikbud, Kecamatan Kajang, Desa Tana Towa, Ammatoa, dan LSM-Aman. Berikut disajikan pemetaan *stakeholder* berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing *stakeholder* dalam Pengembangan ekowisata Hutan Adat Ammatoa Kajang.

1. Aspek Kepentingan (*Interest*)

Ada banyak *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan hutan Adat Ammatoa Kajang namun dari berbagai *stakeholder* yang ada memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepentingan masing-masing. Pada penelitian ini aspek kepentingan dinilai dari (1) keterlibatan *stakeholder* pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan, wisata, dan keterlibatan yang lainnya. (2) Manfaat pengelolaan berupa manfaat ekonomi, fungsi sosial, ekologi, budaya, kepercayaan publik, politik, agama, dan manfaat pengelolaan lainnya. (3) Sumber daya yang disediakan berupa sumberdaya manusia, dana, fasilitas, infrastruktur, dan informasi, dan sumberdaya yang tersedia lainnya. (4) Prioritas pengelolaan dan (5) Ketergantungan sumberdaya. Berikut ini disajikan data berupa aspek kepentingan dari beberapa *stakeholder* yang terlibat pada pengelolaan hutan adat Ammatoa Kajang.

Tabel 1
Penilaian *stakeholder* pada aspek Kepentingan (*Interest*).

No	<i>Stakeholder</i> yang terlibat	KT	MP	SD	PP	KS	Rata-rata
1	Dispar Kabupaten Bulukumba	2	7	7	4	4	4.8
2	Dinas LHK Kabupaten Bulukumba	7	7	6	6	4	6.0
3	Bappeda Kabupaten	7	7	7	6	7	6.8

	Bulukumba							
4	Disdikbud	Kabupaten	3	4	6	5	3	4.2
	Bulukumba							
5	Kecamatan Kajang		7	7	7	6	4	6.2
6	Desa Tanah Towa		7	7	7	7	7	7.0
7	Ammatoa		7	7	7	7	7	7.0
8	LSM AMAN	Kabupaten	2	5	4	6	6	4.6
	Bulukumba							

Keterangan: KT (Keterlibatan), MP (Manfaat Pengelolaan), SD (Sumberdaya yang disediakan), PP (Prioritas Pengolaan), KS (Ketergantungan Sumberdaya).

Kepentingan yang dimiliki masing-masing *stakeholders* bervariasi tergantung pada tupoksi yang dimiliki. *Stakeholders* dengan nilai kepentingan yang tertinggi adalah Desa Tana Towa dan Ammatoa dengan skala 7.0 (Kategori sangat tinggi), sedangkan *stakeholders* dengan nilai kepentingan terendah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 4.2 (kategori cukup/biasa saja).

2. Aspek Pengaruh (*power*)

Aspek pengaruh yang dinilai terbagi atas lima indikator yaitu (1) Aturan atau kebijakan pengelolaan berupa penetapan kebijakan, pelaksanaan sesuai tujuan dan sasaran, mendapatkan manfaat, terdapat dasar hukum yang jelas, terdapat batas-batas lahan yang jelas, dan memegang izin perusahaan/pemanfaatan. (2) Peran dan Partisipasi dinilai dari kontribusi berupa dana,

menetapkan kebijakan, sumberdaya manusia, fasilitas, infrastruktr, dan informasi. (3) Kemampuan dalam berinteraksi berupa melakukan pertemuan untuk membahas rencana pengelolaan, melakukan kerja sama, saling mempengaruhi antar *stakeholder* yang bekerja sama, mengubah arah pengelolaan, mendapatkan dan memberi masukan dalam pengelolaan, dan memiliki track record pengelolaan yang baik. (4) Kewenangan dalam pengolaan berupa kehadiran, arahan, pembinaan, pengamanan, pengawasan dan aturan *stakeholder* terkait. (5) Kapasitas sumberdaya yang disediakan berupa sumber daya manusia, dana, fasilitas, infrastruktur, dan informasi. Berikut ini disajikan data berupa aspek pengaruh dari beberapa *stakeholder* yang terlibat pada pengolaan hutan adat Ammatoa Kajang.

Tabel 2
Penilaian *stakeholder* pada aspek pengaruh (*power*)

No	<i>Stakeholder</i> yang terlibat	AK	PR	KB	KP	KA	Rata-rata
1	Dispar Kabupaten Bulukumba	3	7	7	4	5	5.2
2	Dinas LHK Kabupaten Bulukumba	5	5	7	6	4	5.4
3	Bappeda Kabupaten Bulukumba	7	7	7	7	4	6.4
4	Disdikbud Kabupaten Bulukumba	1	1	3	1	1	1.4
5	Kecamatan Kajang	7	2	5	7	6	5.4
6	Desa Tanah Towa	6	5	6	7	7	6.2
7	Ammatoa	7	7	7	7	7	7.0
8	LSM AMAN Kab. Bulukumba	4	4	5	1	3	3.4

Keterangan.: AK (Aturan atau Kebijakan Pengelolaan), PR (Peran dan Partisipasi), KB (Kemampuan dalam Berinteraksi), KP (Kewenangan dalam Pengelolaan), KA (Kapasitas Sumberdaya yang Disediakan).

Kekuatan (*power*) yang dimiliki *stakeholders* berkaitan erat dengan tupoksi dan posisi yang dimiliki. Lembaga dengan kekuatan yang paling besar berdasarkan hasil analisis adalah Ammatoa dengan nilai 7.0 (kategori sangat tinggi) sedangkan lembaga dengan nilai

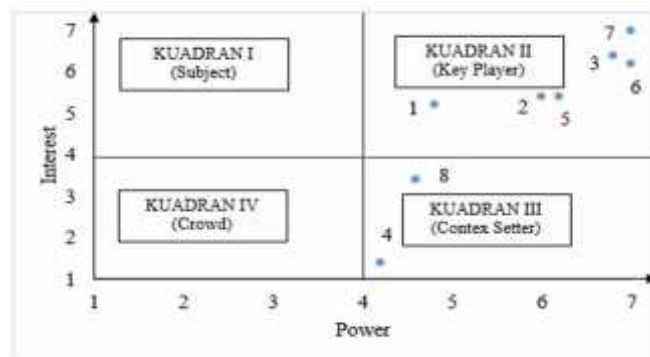
terendah adalah LSM Aman yaitu 3.4 (kategori agak tidak tinggi).

Hasil penilaian *stakeholders* pada masing-masing aspek dapat digunakan untuk membentuk analisis *stakeholders*. Analisis *stakeholders* diformulasikan dengan

menyatukan aspek *power* (sumbu x) dan *interest* (sumbu y) kedalam kuadran *power vs interest* sesuai dengan kekuatan dan kepentingan masing-masing *stakeholders* dalam menentukan kebijakan.

Posisi *stakeholders* dalam kuadran menggambarkan posisi dan tanggungjawab yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* terkait pengelolaan Hutan Adat di Ammatoa Kajang yaitu: (1) *Subject* artinya *stakeholder* dengan kepentingan tinggi tetapi dengan pengaruh/ kekuatan yang rendah. Pada penelitian ini dengan delapan *stakeholder* yang dipilih tidak ditemukan kriteria pada Kuadran I, begitu pula pada Kuadran IV yaitu

(2) *Crowd* artinya *stakeholder* dengan kepentingan dan kekuatan yang rendah. (3) *Key Player* berarti *stakeholder* yang kepentingan dan kekuatan sama-sama tinggi, adapun *stakeholder* terdiri dari Dispar Kabupaten Bulukumba, Dinas LHK Kabupaten Bulukumba, Bappeda Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Tanah Towa, dan Ammatoa. (4) *Context setter* artinya bahwa *stakeholder* memiliki kepentingan rendah namun memiliki kekuatan yang besar yaitu *stakeholdernya* terdiri dari Disdikbud Kabupaten Bulukumba dan LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman).



Gambar 1
Kategori *Stakeholder* Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh.

Keterangan: Kuadran II: (1) Dispar Kabupaten Bulukumba. (2) Dinas LHK Kabupaten Bulukumba. (3) Bappeda Kabupaten Bulukumba. (5) Kecamatan Kajang. (6) Desa Tanah Towa (7) Ammatoa. Kuadran III: (4) Disdikbud Kabupaten Bulukumba (8) LSM AMAN Kab. Bulukumba.

Analisis Sosial Berupa Persepsi, Motivasi, dan Preferensi, Stakeholder

1. Persepsi

Pemaknaan berbagai pihak terhadap kawasan adat Ammatoa Kajang dipandang penting dalam menilai kelayakan suatu kawasan. Selain itu para pihak juga perlu memastikan ketersediaan dan kondisi infrastruktur dan fasilitas penunjang baik dalam pengelolaan maupun dalam pengembangan ekowisata di kawasan adat Ammatoa Kajang. Jika persepsi (pemaknaan) suatu pihak tertentu terhadap kondisi infrastruktur dan fasilitas bernilai baik maka akan berpengaruh kepada peminat yang semakin bertambah dan meningkat namun

jika persepsi dinilai tidak baik maka kondisi sebaliknya akan terjadi. Namun kedua kondisi tersebut mampu menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan kawasan adat Ammatoa Kajang oleh pihak-pihak yang terkait. Pada penelitian ini terdapat dua persepsi yang dinilai oleh para pihak yaitu ketersediaan dan kondisi infrastruktur dan fasilitas yang terdapat di kawasan adat Ammatoa Kajang.

a. Infrastruktur

Penilaian persepsi terhadap infrastruktur yang terdapat pada wilayah Kajang dilihat dari beberapa indikator seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 3
Infrastruktur di Kawasan Adat Ammatoa Kajang

No	Infrastruktur	Skala				Rata-rata
		A	B	C	D	
1	Infrastruktur jalan	6.00	6.50	5.00	4.50	5.50

2	Infrastruktur listrik	1.75	1.50	3.75	3.58	2.65
3	Infrastruktur telekomunikasi	3.00	3.00	4.50	3.75	3.56
4	Infrastruktur air bersih	5.75	6.00	5.50	5.13	5.60
5	Infrastruktur sanitasi	4.25	4.50	4.25	3.88	4.22
6	Transportasi kendaraan umum	4.75	5.50	3.00	3.25	4.13
7	Infrastruktur pengelolaan sampah	3.75	3.50	3.75	3.67	3.67
Skor Rata-rata		4.18	4.36	3.96	4.25	4.19

Keterangan: A) Pemerintah, B) Pemangku Adat, C) Pengunjung/wisatawan, D) Masyarakat Lokal

Penilaian persepsi berupa infrastruktur dari para pihak menggunakan *one score one indicator* menghasilkan skor rata-rata pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku adat menilai infrastruktur di kawasan adat Ammatoa Kajang itu sedang (4.18, 4.39, dan 4.29), sedangkan pengunjung/ wisatawan menilai bahwa infrastruktur yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang itu agak tidak baik (3.96). Kondisi di lapangan memang ditemukan beberapa infrastruktur yang tidak diperbolehkan masuk di dalam kawasan hukum adat (*ilalang embayya*) seperti

infrastruktur telekomunikasi (telepon dan internet), listrik, dan infrastruktur jalan aspal. Pemangku adat dan pemerintah daerah telah sepakat untuk tetap mempertahankan budaya masyarakat adat Ammatoa Kajang untuk tidak menerima modernisasi di dalam kawasan adat termasuk listrik, telekomunikasi, dan jalanan beraspal.

b. Fasilitas

Penilaian persepsi terhadap fasilitas yang terdapat pada wilayah adat Kajang dilihat dari beberapa indikator seperti yang disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Fasilitas di Kawasan Adat Ammatoa Kajang

No	Fasilitas	Skala				Rata-rata
		A	B	C	D	
1	Jalur dan papan interpretasi	4.75	3.50	4.50	5.50	4.56
2	Kuliner makanan dan minuman khas	5.25	4.00	4.42	6.00	4.92
3	Penginapan bernuansa budaya	5.25	5.00	4.13	3.75	4.53
4	Pusat keamanan	5.75	4.50	4.79	5.00	5.01
5	Pusat Informasi wisata	5.25	6.00	4.58	4.75	5.15
6	Kendaraan lokal (kuda)	6.50	6.50	4.38	4.75	5.53
7	Tempat Ibadah (Mushallah)	6.25	6.00	4.50	4.75	5.38
Rata-rata		5.57	5.07	4.47	4.93	5.01

Keterangan: A) Pemerintah, B) Pemangku Adat, C) Pengunjung/wisatawan, D) Masyarakat Lokal

Penilaian persepsi berupa fasilitas dari para pihak menggunakan *one score one indicator* menghasilkan skor rata-rata pemerintah dan pemangku adat menilai fasilitas di kawasan adat Ammatoa Kajang itu agak baik (5.57 dan 5.07). Sedangkan Pengunjung dan masyarakat lokal menilai bahwa fasilitas yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang itu sedang

dan mendekati agak baik (4.47 dan 4.93). Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa jalur dan papan interpretasi, kuliner, dan penginapan bernuansa budaya sangat minim keberadaannya sehingga berdasarkan data yang dikumpulkan rata-rata para pihak menilai ketiga fasilitas tersebut sedang (4.56, 4.92, dan 4.53).

Tabel 5
Rata-rata persepsi para pihak

No	Para Pihak	Skala
1	Pemerintah	4.87
2	Pemangku Adat	4.71
3	Pengunjung/ wisatawan	4.21
4	Masyarakat Lokal	4.59
Rata-rata		4.59

Para pihak menilai ketersediaan dan kondisi infrastruktur dan fasilitas yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang mendekati agak baik (skor rata-rata 4.59). Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan pada beberapa infrastruktur

dan fasilitas agar ketersediaan dan kondisinya dapat menunjang kenyamanan pengunjung/wisatawan. Sehingga dengan adanya pembenahan dan perbaikan oleh

para pihak yang berwenang maka diharapkan akan terbentuk ekowisata kawasan adat Ammatoa Kajang yang berkelanjutan (*sustainable*).

2. Motivasi

Motivasi pada kondisi penelitian ini menanyakan kepada para pihak tentang motivasinya jika kawasan adat Ammatoa Kajang dikembangkan menjadi obyek wisata budaya yang berbasis ekowisata.

Tabel 6
Motivasi para pihak ditinjau dari segi meningkatkan pendapatan masyarakat lokal

No	Motivasi	Skala				Rata-rata
		A	B	C	D	
1	Sebagai tempat tujuan wisata yang memicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya.	5.25	6.00	4.33	5.00	5.15
2	Sebagai tempat yang memicu pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi.	4.75	5.50	4.63	5.50	5.10
3	Sebagai tempat tujuan wisata yang memicu peningkatan lapangan pekerjaan	5.00	5.50	4.67	5.50	5.17
4	Sebagai tempat tujuan wisata yang memicu peningkatan peluang investasi	4.75	5.50	4.38	4.75	4.85
5	Sebagai tempat tujuan wisata yang memicu peningkatan peluang usaha	5.00	5.50	4.83	5.25	5.15
6	Sebagai tempat tujuan wisata yang memicu pangsa pasar bagi produk lokal, sehingga aneka ragam produk terus berkembang	5.00	5.50	5.08	5.25	5.21
7	Sebagai tempat tujuan wisata yang memicu meningkatnya pajak usaha atau stimulus untuk meningkatkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).	4.75	5.00	4.21	4.75	4.68
Rata-rata		4.93	5.50	4.59	5.14	5.04

Keterangan: A) Pemerintah, B) Pemangku Adat, C) Pengunjung/wisatawan, D) Masyarakat Lokal

Motivasi para pihak menggunakan *one score one indicator* memperlihatkan bahwa pemangku adat dan masyarakat lokal memiliki motivasi agak tinggi/ agak setuju (5.50 dan 5.14) dibandingkan dengan pemerintah dan pengunjung/ wisatawan yang memiliki motivasi sedang (4.93 dan 4.59).

Tabel 7

Rata-rata Motivasi para pihak

No	Para Pihak	Skala
1	Pemerintah	4.93
2	Pemangku Adat	5.50
3	Pengunjung/ wisatawan	4.59
4	Masyarakat Lokal	5.14
Rata-rata		5.04

Para pihak menilai bahwa motivasi jika kawasan adat Ammatoa Kajang dikembangkan menjadi obyek wisata budaya yang berbasis ekowisata dari segi perekonomian/ pendapatan tidak memperlihatkan motivasi yang sangat tinggi/ sangat setuju. Terbukti dari rata-rata scoring yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan skala agak tinggi (5.04). Hal tersebut mengindikasikan bahwa para pihak tidak terlalu meprioritaskan motivasi dalam hal peningkatan pendapatan (segi ekonomi) tetapi bisa saja ada motivasi lain yang lebih prioritas.

3. Preferensi

Preferensi merupakan perihal yang menjadi prioritas dari berbagai alternatif yang ada. Dalam konteks penelitian ini preferensi dalam pengembangan ekowisata wilayah adat Ammatoa Kajang dibagi atas dua yaitu (1) Preferensi terhadap pengembangan tapak dan destinasi dan (2) Preferensi terhadap

pemberdayaan masyarakat lokal. Para pihak menilai disetiap indikator untuk mengetahui sejauh mana persetujuan dalam pengembangan tapak dan destinasi dan pemberdayaan masyarakat lokal terhadap pengembangan ekowisata wilayah adat di Kajang.

Tabel 8
Preferensi terhadap pengembangan tapak dan destinasi

No	Preferensi Infrastruktur dan Fasilitas	Skala				Rata-rata
		A	B	C	D	
1	Pembangunan sarpras interpretasi (label, petunjuk arah, papan informasi dst.)	5.25	4.50	5.54	6.00	5.32
2	Penataan jalan setapak (akses tersier)	5.25	4.50	5.08	5.50	5.08
3	Pembangunan sarpras kesehatan	4.75	5.00	5.71	6.50	5.49
4	Pembangunan sarpras kuliner dan souvenir	4.50	4.50	5.46	6.25	5.18
5	Pembangunan tourist information center	5.00	5.00	5.75	6.25	5.50
6	Penyediaan transportasi lokal (kuda)	5.25	4.50	5.58	6.50	5.46
7	Penyediaan jalur tracking ke sungai dan hutan adat	5.50	5.00	5.38	6.00	5.47
Rata-rata		5.07	5.07	4.71	6.14	5.25

Keterangan: A) Pemerintah, B) Pemangku Adat, C) Pengunjung/wisatawan, D) Masyarakat Lokal

Penilaian preferensi berupa pengembangan tapak dan destinasi menggunakan *one score one indicator* memperlihatkan bahwa masyarakat lokal memiliki tingkat kemauan yang tinggi (6.14). Sedangkan pemerintah dan

pemangku adat menilai agak tinggi (5.07), selain itu pengunjung/ wisatawan menilai preferensi terhadap pengembangan tapak dan destinasi mendekati agak tinggi (4.71).

Tabel 9
Preferensi terhadap pemberdayaan masyarakat lokal

No	Preferensi pemberdayaan masyarakat	Skala				Rata-rata
		A	B	C	D	
1	Memberikan pelatihan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.	5.50	5.00	5.63	6.50	5.66
2	Memberikan pelatihan terhadap pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan MHA.	5.50	5.00	5.46	6.50	5.62
3	Memberikan pelatihan dalam menjaga, mengendalikan, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual MHA (misal:teknologi, budidaya, hasil tenun, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan).	5.00	5.50	5.75	6.50	5.74
4	Memberikan pelatihan interpretasi/ pemandu wisata	5.25	5.00	5.54	6.50	5.57
5	Memberikan pelatihan manajemen usaha wisata/pelatihan souvenir	5.00	5.00	5.46	6.50	5.49
6	Memberikan pelatihan seni budaya	5.00	5.50	5.75	6.50	5.69
7	Memberikan insentif untuk penyediaan sarana wisata	5.50	6.00	5.42	6.25	5.79
Rata-rata		5.32	5.21	5.57	5.50	5.40

Keterangan: A) Pemerintah, B) Pemangku Adat, C) Pengunjung/wisatawan, D) Masyarakat Lokal

Penilaian preferensi berupa pemberdayaan masyarakat lokal memperlihatkan bahwa

pengunjung/ wisatawan dan masyarakat lokal memiliki tingkat kemauan yang mendekati

tinggi/ setuju (5.57 dan 5.50). Sedangkan pemerintah dan pemangku adat menilai agak tinggi (5.32 dan 5.21).

Tabel 10
Rata-rata preferensi para pihak

No	Para pihak	Skala
1	Pemerintah	5.19
2	Pemangku Adat	5.14
3	Pengunjung/ wisatawan	5.14
4	Masyarakat Lokal	5.82
Rata-rata		5.32

Para pihak menilai bahwa preferensi baik berupa pengembangan tapak dan destinasi maupun pada pemberdayaan masyarakat lokal memiliki kemauan yang agak tinggi (5.32). Hal tersebut mengindikasikan bahwa para pihak terkait setuju untuk dilakukan pengembangan tapak dan destinasi seperti yang tertera pada tujuh indikator yang ditawarkan seperti pembangunan sarpras interpretasi, penataan jalan setapak (akses tersier), pembangunan sarpras kesehatan, pembangunan sarpras kuliner dan souvenir, pembangunan tourist information center, penyediaan transportasi lokal (kuda) dan penyediaan jalur tracking ke sungai dan hutan adat. Selain itu para pihak juga setuju untuk dilakukannya pemberdayaan masyarakat lokal seperti yang tertera dalam tujuh indikator tawaran yaitu: (1) memberikan pelatihan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. (2) Memberikan pelatihan terhadap pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan MHA. (3) Memberikan pelatihan dalam menjaga, mengendalikan, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual MHA (misal: teknologi, budidaya, hasil tenun, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual, dan kesusastraan). (4) Memberikan pelatihan interpretasi/pemandu wisata. (5) Memberikan pelatihan manajemen usaha wisata/ pelatihan souvenir. (6) Memberikan pelatihan seni budaya. (7) Memberikan insentif untuk penyediaan sarana wisata.

PENUTUP

Kesimpulan

Stakeholder yang memiliki keterlibatan dalam hal kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang tinggi pada pengelolaan kawasan adat dan rencana pengembangan ekowisata hutan adat di Ammatoa Kajang berdasarkan analisis *stakeholder* terbagi atas dua kelompok yaitu *key player* (Dispar Kabupaten Bulukumba, Dinas LHK Kabupaten Bulukumba, Bappeda Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang, Desa Tanah Towa, dan Ammatoa) dan *Context setter* (Disdikbud Kabupaten Bulukumba dan LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Pengembangan ekowisata kawasan adat Ammatoa Kajang yang berkelanjutan (*sustainable*) dapat diperoleh dengan menilai persepsi, motivasi, preferensi, dan partisipasi para pihak yang ditinjau dari berbagai indikator terkait. Persepsi terhadap ketersediaan dan kondisi infrastruktur dan fasilitas yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang dinilai sedang olehnya itu perlu dilakukan pembenahan pada beberapa infrastruktur dan fasilitas agar ketersediaan dan kondisinya dapat menunjang kenyamanan pengunjung/ wisatawan. Penilaian motivasi dari segi ekonomi menunjukkan skor agak tinggi yang mengindikasikan bahwa *stakeholder* sepatutnya untuk dilakukan pengembangan ekowisata. Preferensi para pihak menaruh kemauan yang agak tinggi terhadap ekowisata di Kajang sehingga para pihak terkait setuju untuk dilakukan pengembangan tapak dan destinasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. *Stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap hutan adat Ammatoa Kajang perlu melakukan pertemuan bersama untuk merumuskan model pengembangan ekowisata yang efektif yang dapat diterapkan pada kawasan adat. Selain itu preferensi para pihak perlu dipertimbangkan terkait pengembangan tapak dan destinasi di kawasan adat dengan memperhatikan budaya yang masih dilestarikan.

REFERENSI

- Avenzora, R. (2008). *Ekoturisme: Teori dan Praktek*. Nias: BRR NAD.
- Bahar. (2006). *Berdayakan Masyarakat Hukum Adat untuk Perlindungan*

- Lingkungan. Komnas HAM.
- Bangun, W. (2011). *Intisari Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bornemeier, J., Victor, M., & Durst, P. B. (1997). *Ectourism for Forest Conservation and Community Development*. Ching Mai, Thailand: RAP Publication.
- Ceballos-Lascuráin, H. (1996). *Tourism, ecotourism, and protected areas: the state of nature-based tourism around the world and guidelines for its development*. Switzerland: IUCN-World Conservation. <https://doi.org/https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.1996.7.en>
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1998). *Tourism: Principles and Practice*. (R. Shepherd, Ed.) (second edi). New York: Longman Publishing.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamalik, O. (2004). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermawan, H., & Ghani, Y. A. (2018, May 4). Geowisata: Solusi Pemanfaatan Kekayaan Geologi yang Berwawasan Lingkungan. <https://doi.org/10.31227/osf.io/a5xd6>
- Lewis, D., Bell, S. D., Fay, J., Bothi, K. L., Gatere, L., Kabila, M., Mukamba, M., Matokwani, E., Mushimbalume, M., Moraru, C., Lehmann, J., Lassoie, J., Wolfe, D., Lee, D., Buck, L., Travis, A. J. (2011). Community Markets for Conservation (COMACO) links biodiversity conservation with sustainable improvements in livelihoods and food production. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(34), 13957–13962. <https://doi.org/10.1073/pnas.1011538108>.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Robbins, S. (2013). *Organizational Behavior*. *Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki*. <https://doi.org/10.12737/4477>
- Sugono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi keem). Jakarta: Gramedia.
- Tisdell, C., & Wilson, C. (2012). *Nature-based Tourism and Conservation: New Economic Insights and Case Studies*. USA: Edward Elgar Publishing.
- Wahyudi. (2013). *Buku Pegangan Hasil Hutan Bukan Kayu*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- WGII. (2016). *Jalan Panjang Masyarakat untuk Konservasi dan Ruang Hidup. 15 Cerita Konservasi Masyarakat Adat di Indonesia (ICCAs)*.
- Widhiastuti, R. (2008). *Keanekaragaman dan Konservasi Vegetasi Hutan Gunung Sinabung untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Widowati, D. A., Luthfi, A. N., & Guntur, I. G. N. (2014). *Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*.

BIODATA PENULIS

Nurkhalis, S.Hut lahir 20 September 1993 di Sulawesi Selatan. Mengenyam pendidikan SD- SMA di Kabupaten Bone. Melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin pada Fakultas Kehutanan dan tamat pada tahun 2015 dengan predikat *cumlaude*. Penulis kembali melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2016 dengan program studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan

di Institut Pertanian Bogor. Hingga saat ini penulis tercatat sebagai LPDP RI sejak tahun 2016 hingga 2018.

Dr. Ir. Harnios Arief, M.Sc.F, Staf pengajar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Dr. Ir. Tutut Sunarminto, M. Si, Staf pengajar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.